

KEBIJAKAN PENANGANAN RESESI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Muhamad Afif Sholahudin

Yayasan Rumah Binaan Generasi
muhammadafif2@gmail.com

Abstract

Indonesia has entered a period of crisis until a recession caused by economic policies and natural disasters that occurred. several times have passed through periods of economic crisis, until the last recession in 2020 caused by the arrival of a natural disaster in the form of Covid-19. A recession is characterized by a contraction of a country's economic growth for more than one quarter. The government's strategy to deal with a recession in 2020 is to accelerate the realization of the National Economic Recovery (PEN), increase government consumption, and modify social protection spending. This research is in the form of descriptive research with inductive method and analysis used with critical theory approach. Islamic Economic Politics (siyasaah maliyah) is based on the pillars of Islamic economics, policies that are born to overcome the economy are based on several factors, namely: Turning on the human urge to seek economic resources, economic distribution to avoid centralized wealth, restructuring of the public economy, financial restructuring, and structural changes. The implications of this pillar are the success of economic policies in dealing with the recession in Indonesia.

Keywords: *Distrbution, Economy, Islam, Policy, Recession*

Abstrak

Indonesia pernah memasuki masa krisis hingga resesi disebabkan oleh kebijakan ekonomi dan bencana alam yang terjadi. beberapa kali pernah melewati masa krisis ekonomi, hingga terakhir resesi Tahun 2020 yang disebabkan datangnya bencana alam berupa Covid-19. Resesi ditandai dengan terkontraksi pertumbuhan ekonomi suatu negara lebih dari satu kuartal. strategi pemerintah yang dilakukan untuk menghadapi resesi di tahun 2020 adalah dengan mempercepat realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meningkatkan konsumsi pemerintah, hingga memodifikasi belanja perlindungan sosial. Penelitian ini berupa riset deskriptif dengan metode secara induktif dan analisis yang digunakan dengan pendekatan *critical theory*. Politik Ekonomi Islam (*siyasaah maliyah*) berdasarkan pada pilar ekonomi Islam, kebijakan yang dilahirkan untuk mengatasi ekonomi dilandasi beberapa faktor, yakni: Menghidupkan dorongan manusia untuk mencari sumber-sumber ekonomi, distribusi ekonomi untuk menghindari kekayaan yang terpusat, restrukturisasi ekonomi publik, restrukturisasi keuangan, dan perubahan struktural. Implikasi yang dilahirkan dari pilar tersebut berupa keberhasilan kebijakan ekonomi dalam menangani resesi di Indonesia.

Kata Kunci: *Distribusi, Ekonomi, Islam, Kebijakan, Resesi*

A. Pendahuluan

Indonesia dalam sejarah ekonomi pernah menghadapi resesi di tahun 2020. Tercatat dalam data Badan Pusan Statistik (BPS) ekonomi Indonesia pada triwulan ke-III 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan terhadap ekonomi triwulan ke-III 2019 sebesar 3,94 persen (*y-on-y*). Disebut oleh banyak pengamat ekonomi bahwa Indonesia resmi mengalami resesi karena sudah dua kali berturut-turut masuk dalam zona minus, di mana sebelumnya pada Triwulan ke-II 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen (*detik.com*, 5/11/2020). Melihat Triwulan ke-3 2020 ekonomi Indonesia terlihat membaik sebesar 5,05 persen (*q-on-q*) dibanding Q2, namun secara kumulatif dari Triwulan 1 s/d 3-2020, PDB masih mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen dibandingkan dengan Triwulan 1 s/d 3-2019. Kondisi resesi ini pun berpengaruh pada pengeluaran tahunan yang hampir seluruhnya mengalami kontraksi, begitupun konsumsi rumah tangga yang mengalami penurunan cukup dalam, yakni sebesar minus 4,04 persen.

Kondisi semacam ini yang menimpa Indonesia diprediksi karena pandemi yang sampai saat ini masih belum selesai. Karena pandemi pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penanganan Covid-19 yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, seperti penutupan sekolah dan pasar-pasar, pembatasan sosial berskala besar, dan kebijakan lainnya yang mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi dan investasi. Kondisi ini dirasakan pula oleh berbagai negara di dunia, seperti di Amerika Serikat, Jerman, Italia, Perancis, dll. Dirangkum dari *Trading Economics* dengan pencantuman data kuartal paling akhir (*y-on-y*), tercatat 43 negara dunia resmi masuk ke dalam resesi (*cncindonesia.com*, 4/9/20)

Kondisi resesi ini akan mengakibatkan belanja masyarakat yang menurun karena pendapatan yang berkurang, pengangguran akan semakin banyak dan kemiskinan semakin meningkat, banyak yang harus menerima PHK atau pemotongan gaji, dan dampak lain yang timbul walau tidak rata semua masyarakat merasakan dampak yang sama. Pemerintah menerapkan strategi percepatan penyerapan untuk menstimulasi perekonomian sehingga mengurangi kontraksi ekonomi. Strategi ini tentunya mengatasi beberapa sebab munculnya resesi dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter demi terciptanya stabilitas ekonomi yang normal.

Resesi tentunya akan mengancam siapapun orangnya dan bagaimanapun bentuk negaranya. Ekonomi Islam yang menerapkan prinsip syariah berjalan dalam roda ekonomi dengan objek manusia yang sama, maka bukan berarti tidak mungkin resesi itu dirasakan dalam sistem ekonomi Islam. Salah satu langkah pembangunan ekonomi Islam adalah strategi yang diajarkan dalam Politik Ekonomi Islam untuk menangani kemungkinan jika terjadi resesi. Penanganan resesi sistem politik ekonomi Islam memiliki strategi ‘khas’ dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengupas bagaimana perspektif politik ekonomi Islam dalam memandang resesi dan upaya penanganannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian dari makalah ini menggunakan penelitian kualitatif, berupa riset yang menjelaskan secara deskriptif dan lebih menggunakan analisis melalui pendekatan induktif (Rukin, 2019:6). Penelitian ini dilakukan pada kondisi tertentu dengan maksud untuk memahami atau menginvestigasi fenomena atas sebab terjadinya. Maka penelitian ini berbasis pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *in-depth and case oriented study* atas beberapa kasus atau kasus tunggal. Dari penelitian ini bertujuan untuk membuat fakta mudah dipahami dan menghasilkan asumsi baru atau hipotesis baru. Studi literatur dilakukan bersumber dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang relevan, sumber laman berita terpercaya, serta beberapa artikel yang dipublikasi secara online.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *critical theory*, menurut Neuman (2003) tujuan dari pendekatan *critical* adalah untuk memperjuangkan ide peneliti supaya perubahan dapat lahir di tengah masyarakat secara substansial. Sebuah penelitian tidak lagi merupakan karya ilmiah yang ditulis secara netral dan bersifat apolitis, namun seharusnya digunakan sebagai alat untuk mengubah institusi sosial, cara berfikir, dan berperilaku masyarakat ke arah yang kita yakini akan lebih baik lagi dari sebelumnya (M Fitrah, 2017: 40). Maka tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi kebijakan penanganan resesi di Indonesia dari sudut pandang ilmu Politik Ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dari krisis Hingga Resesi di Indonesia

Sejak kemerdekaan, Indonesia pernah mengalami dua krisis, yakni ketika pertengahan tahun 1960-an dan di akhir tahun 1990-an. Krisis pada pertengahan 1960-an para pengamat menjelaskan bahwa terjadinya karena disebabkan faktor-faktor internal (domestik), terutama pengabaian yang berkepanjangan atas pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang nalar dalam pengambilan kebijakan. Akibatnya Indonesia terseret pada kehancuran ekonomi dan hiperinflasi yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah akibat pencetakan uang guna menutup defisit anggaran yang terus naik. Sedangkan krisis akhir 1990-an terjadi karena faktor-faktor eksternal, yaitu perubahan secara tiba-tiba sentimen pasar di kalangan kreditor asing dan investor yang berkembang menjadi sebuah kepanikan. Para investor yang menarik sejumlah besar modal di ASEAN, termasuk Indonesia, berdampak pada depresiasi tajam nilai mata uang, ditambah ketidakmampuan atau keengganan pemerintah menghadapi krisis ekonomi yang berimbas pada krisis politik. Krisis itu mampu melengserkan Soeharto dari kursi tahtanya yang telah bertahan selama 32 tahun pada Mei 1998 (Thee Kian Wee, 2016:46).

Kehancuran ekonomi pada pertengahan 1960-an merupakan akibat logis dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang buruk dan terus dijalankan pemerintah sejak akhir 1950-an. Presiden Soekarno dengan Ekonomi Terpimpin-nya (lahir dari era sistem Demokrasi Terpimpin), Indonesia akan mengembangkan sistem “Sosialisme ala Indonesia”, sayangnya tidak pernah dijelaskan cita-cita membangun dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur di bawah Ekonomi Terpimpin. Kebijakan ekonominya dilihat sebagai bagian integral dari strategi politik umum.

Tujuan ekonomi seperti menyediakan sandang dan pangan bagi rakyat, seringkali dicampuradukkan dengan tujuan-tujuan politik dan kebudayaan. Pidato-pidato presiden awal 1960-an pun sering menyinggung aspek berdikari dan banting stir, menekankan perencanaan yang makin terpusat, kendali pemerintah yang lebih ketat terhadap perdagangan luar negeri, tindakan yang lebih tegas terhadap salah urus, dan penyelesaian persoalan modal asing untuk mencapai kemerdekaan ekonomi sepenuhnya. Unsur-unsur pembangunan lainnya pun diusung, seperti reformasi agraria, swasembada pangan, peningkatan dukungan pemerintah terhadap koperasi, reorganisasi peran swasta agar sesuai dengan “prinsip kekeluargaan”, dan tentunya pemusatan kebijakan di tangan pemerintah.

Sebagian besar programnya mengalami kegagalan, salah satunya program reformasi agraria karena tidak difokuskan untuk meningkatkan panen padi, justru dihambat oleh para pejabat yang lamban melaksanakan tugas demi melindungi kepentingan para tuan tanah besar. Selain itu kondisi inefisiensi perusahaan hasil nasionalisasi gagal mencapai tujuan pemerintah untuk swasembada sandang pangan, akhirnya program ini ditinggalkan pada 1964. Efek domino pun terlihat, seperti membengkaknya defisit anggaran dan menipisnya devisa.

Cepatnya laju kemerosotan ekonomi Indonesia adalah kondisi yang serupa dengan istilah “politik kemunduran ekonomi” yang diteorikan oleh Herbert Feith (Herbert Feith, 1967:46). Menurutnya, titik temu antara ekonomi dan politik Indonesia berkaitan dengan “pencitraan”, yakni penggunaan secara luas berbagai simbol, upacara, dan pidato serta perumusan dan maklumat berbagai tujuan revolusi yang digabung dengan ritus pertunjukan kekuatan simbol-simbol tersebut dalam mencapai tujuan. Bahkan Soekarno dinilai tidak terdorong untuk meminta nasihat-nasihat ekonomi dari para ahli karena terfokus pada persoalan misi ‘menyelesaikan revolusi nasional’ (John Legge, 1972:328-329). Banyak tekanan pada sumber daya ekonomi dalam negeri sehingga Indonesia terancam kebangkrutan. Hingga muncul “Kudeta Gestapu” pada akhir 1965 dengan jatuhnya Presiden Soekarno di tengah kondisi masyarakat yang ditekan atas imbas hiperinflasi (Thee Kian Wie, 2016:60).

Tidak seperti krisis sebelumnya, krisis yang terjadi pada 1990-an didahului pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berlangsung selama tiga dasawarsa. Pada 1996 akhir sempat mengalami pertumbuhan ekonomi 7,8 persen dan di awal 1997 memungkinkan pertumbuhan di angka 4,6 persen. Namun mulai masuk pertengahan 1997 krisis sepenuhnya mulai terasa, dan semakin parah pada 1998 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -13,6 persen. Hampir semua sektor mengalami kontraksi yang tajam, kecuali pertanian, pertambangan, dan pekerjaan umum. Jika dibandingkan krisis yang terjadi 1990-an lebih buruk -3,0 persen dibandingkan krisis pada 1963.

Krisis yang terjadi pada 1998 berdampak besar pada wilayah perkotaan, khususnya pekerja di sektor manufaktur padat karya, konstruksi, dan industri jasa modern. Akibatnya upah riil merosot tajam, baik sektor perdagangan maupun non-perdagangan, sebab penyesuaian nominal upah kalah cepat dengan laju inflasi (Chris Manning, 2000:128-130). Turunnya penghasilan mengakibatkan turunnya daya beli dan hiperinflasi, akhirnya berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan mutlak.

Secara perlahan ekonomi mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, begitupun angka kemiskinan yang ikut menurun. Berdasarkan data BPS tentang persentase penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan, tahun 1996 berada pada angka 17,6 persen dan mengalami kenaikan tinggi sebanyak 24,2 persen dan 23,5 persen selama dua tahun setelahnya berturut-turut (1997-1998). Lalu penurunan itu dapat kembali ke angka masa sebelum krisis ketika di tahun 2002 dengan angka 17,4 persen (BPS, 2020). Namun laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 hingga 4 persen setahun dinilai belum cukup untuk menyerap 2 hingga 2,5 juta pendatang baru di pasar tenaga kerja dan untuk mengurangi kemiskinan (David Ray, 2003:284). Setidaknya 6-7 persen laju pertumbuhan untuk bisa mengembalikan korban dampak sektor informal seperti sebelum masa krisis.

Tahun 2020 menjadi krisis tersulit bagi Indonesia, karena harus menerima angka kontraksi yang terindikasi masuk ke dalam jurang resesi. Penyebab utama yang melatarbelakanginya adalah fenomena pandemi, sehingga merubah struktur kebiasaan ekonomi serentak seluruh wilayah, bahkan berbagai negara di dunia. Data BPS Agustus 2020 tercatat 9,77 juta orang di Indonesia adalah pengangguran, angka ini telah mengalami kenaikan yang signifikan yakni bertambah sebanyak 2,67 juta orang (*y-on-y*). begitupun mereka yang terpaksa harus menerima pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang dan 1,77 juta orang tidak bekerja karena covid-19. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, persentase penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar 14,28 persen.

Pandemi Covid-19 yang menjadi sebab ekonomi mengalami kontraksi hingga saat ini masih berlangsung, bahkan angka yang semakin tinggi membuat relaksasi ekonomi yang

sempat diusahakan pemerintah sebagian besar aktivitas harus diperketat kembali. Angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-III tahun 2020 di angka -3,49 persen belum tentu membawa perubahan baik dari relaksasi yang diberikan saat *New Normal* disahkan. BPS belum mengumumkan angka pertumbuhan di akhir tahun 2020 pada triwulan ke-IV yang kemungkinan masih berada di angka minus. Sri Mulyani pernah merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal ke-IV tahun 2020 ke angka minus 2,9 persen dari awal prediksi akan mendekati 0 persen (*money.kompas.com*, 21/12/2020)

2. Kebijakan Penanganan Resesi di Indonesia

Standar kesejahteraan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat mengacu kepada standar hidup atau nilai semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu perkapita. Ukuran yang umum digunakan adalah *output* nasional per kapita, dengan standar konvensional yakni Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). Bisa dikatakan bahwa PDB adalah total produksi barang dan/atau jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah negara pada periode tertentu. Berbeda dengan GNP (*Gross National Product*) yang menghidung pendapatan dari warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, GDP tidak membatasi warga negara namun pendapatan riil di dalam negeri (domestik) tanpa membedakan kepemilikan/kewarganegaraan selama periode tertentu. Biasanya nilai GDP pada negara berkembang lebih besar dibandingkan GNP karena banyak investor asing yang menanamkan modalnya (Ali Ibrahim, 2016:38). Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi berarti mencerminkan kapasitas produksi suatu negara, dengan beberapa indikator keberhasilan berupa (Yan Hanif, 2019:16):

1. Pendapatan nasional riil meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
2. Pendapatan per kapita riil meningkat dalam jangka panjang.
3. Kesejahteraan penduduk meningkat selama waktu tertentu.
4. Jumlah tenaga kerja dalam proses produksi meningkat.

Indonesia sendiri pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di angka tertinggi ketika tahun 1980 dengan pertumbuhan 9,88 persen, dan pernah mengalami kontraksi terburuk di angka -13,13 persen di tahun 1998. Kondisi ekonomi terbaru saat Indonesia resesi terjadi pada pertumbuhan ekonomi triwulan ke-III 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -3,49 persen setelah mengalami kontraksi pada triwulan ke-II 2020 sebesar -5,32 persen (*y-on-y*). Dari sisi lapangan usaha, PDB saat itu didominasi 64,13 persen dari lapangan usaha berjenis industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, 88,43 persen berasal dari Rumah Tangga dan Investasi.

Resesi merupakan istilah yang serupa dengan krisis, namun dengan dampak yang lebih mendasar. Krisis ekonomi terjadi karena adanya penurunan ekonomi yang drastis, inflasi yang sangat tinggi, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, dan jika berlangsung lama akan berlanjut pada kondisi resesi. Resesi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam, penyebabnya bisa muncul karena fenomena yang tiba-tiba atau inflasi yang tidak terkendali. Fenomena umum yang menjadi penyebab terjadinya resesi adalah sebagai berikut:

1. Guncangan ekonomi yang muncul tiba-tiba, biasanya karena peristiwa besar tak terduga mengakibatkan gangguan ekonomi luas, mulai dari bencana alam atau teroris. Pandemi Covid-19 merupakan penyebab utama terjadinya resesi tahun 2020 di berbagai negara.
2. Utang yang berlebihan, semakin tinggi utang akan mengakibatkan kebangkrutan karena tidak dapat memenuhi pembayaran.
3. Gelembung aset, pengaruh dari datangnya para investor ke dalam negeri.
4. Inflasi terlalu tinggi, akibat pemerintah tidak mampu menstabilkan inflasi.

5. Deflasi berlebihan, sebab harga yang semakin menurun menyebabkan upah pun akan mengalami penurunan yang sama.
6. Perubahan teknologi, sangat mempengaruhi terhadap fenomena tenaga kerja.

Resesi di suatu negara umumnya diawali dari pelemahan ekonomi global yang memengaruhi perekonomian dalam negerinya, semakin tinggi ketergantungan kepada ekonomi global semakin cepat resesi itu terasa. Meskipun pengaruh pelemahan ekonomi global terhadap munculnya resesi tidak seragam dirasakan oleh berbagai negara di dunia, namun Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampaknya. Sebagai negara yang bergantung pada ekspor barang tambang, bahan baku, dan pembantu, akan lebih merasakan dampak resesi dari perekonomian global. Menurunnya ekspor batubara, kelapa sawit, karet, atau barang mentah lainnya terasa karena ekonomi negara importir pun sedang mengalami pelemahan yang sama sehingga permintaannya menurun.

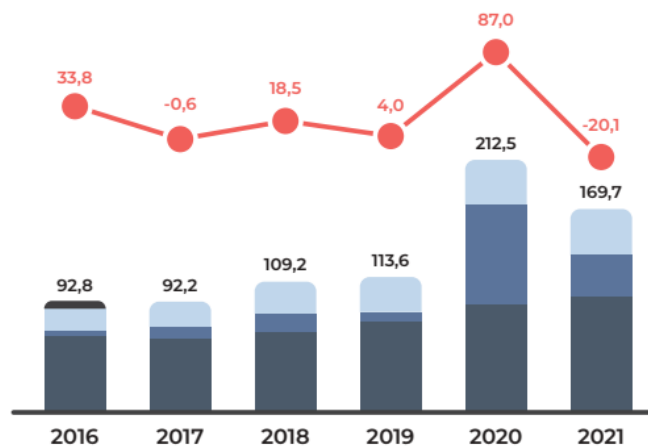
Negara yang kedatangan masuk ke dalam resesi biasanya akan mengeluarkan kebijakan untuk kemudahan pengurusan administrasi perizinan dan pajak bagi para investor agar mereka lebih mudah berinvestasi. Tujuannya agar ekonomi tetap hidup dan daya beli tetap terjaga, sebab jika terus dibiarkan akan berakibat pada fase depresi ekonomi yang lebih parah. Bisa dibayangkan, 88,43 persen pos pengeluaran dipengaruhi dominan oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, jika keduanya terhambat maka pengaruhnya akan sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dampak pandemi yang meluas di Tahun 2020 banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja. Sebagaimana data meningkatnya pengangguran disebabkan perusahaan terpaksa mengurangi jumlah karyawan karena pemberlakuan *lockdown* dan *Work From Home* (WFH). Salah satu penanganan sosial untuk mengatasi dampak pandemi pada pengangguran adalah program Kartu Pra Kerja. Program yang sebelumnya pernah dijalankan tersebut akhirnya ditingkatkan anggaran yang awalnya Rp. 10 triliun menjadi Rp. 20 triliun untuk membantu 5,6 juta orang pengangguran terdampak Covid-19. Program ini membuat daya tarik masyarakat yang cukup tinggi, terlihat pendaftar yang berjuang menjadi penerima Kartu Pra Kerja mencapai kurang lebih 23,8 juta orang. Tidak heran mencapai angka sebanyak itu, karena selain pekerja yang terdampak hadir pula mereka yang baru menyelesaikan pendidikan formal termasuk yang diperbolehkan untuk mendaftar. Sepanjang tahun 2020 pemerintah sudah membuka sebanyak 11 gelombang, dan rencananya akan berlanjut pada gelombang berikutnya di tahun 2021 (*kompas.com*, 16/01/2021).

Harus diakui, penyebab utama terjadinya resesi di tahun 2020 adalah karena pandemi Covid-19. Pemerintah berusaha melakukan penanganan dengan mengeluarkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa pengalokasian anggaran untuk enam sektor sebesar Rp. 695,20 triliun. Namun hingga akhir tahun 2020 Kemenkeu mencatat per tanggal 14 Desember 2020 program ini baru terealisasi sebanyak 69,6 persen atau sekitar Rp. 483,62 triliun. Angka realisasi itu pun menunjukkan beberapa program belum terserap seluruhnya. Stimulus perlindungan sosial yang terserap 94,3 persen terhadap total anggaran Rp. 230,31 triliun, namun seperti program kesehatan baru terealisasi 47 persen dari total anggaran Rp. 99,5 triliun, dukungan sektoral, K/L, dan Pemda terserap 82 persen dari pagu Rp. 67,86 triliun, insentif perpajakan baru terserap 41 persen dari pagu Rp. 120,61 triliun, dan terakhir realisasi dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terserap 92 persen dari anggaran Rp. 116,31 triliun (*kontan.co.id*, 21/12/2020).

Tujuan program PEN tidak lain berfokus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Semisal program kesehatan yang dikelola untuk mendukung peralatan tenaga medis dan rumah sakit darurat hingga mengalokasikan rumah sakit rujukan khusus pasien

Covid-19. Namun penulis mempertanyakan dari sikap pemerintah yang tidak menjadikan ini fokus penanganan, terlihat anggaran yang tersedia hanya 13,8 persen dari total anggaran program PEN yang disediakan, padahal kesehatan seharusnya menjadi fokus utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar keluar dari krisis pandemi. Selama masalah kesehatan tidak beres, maka krisis tidak akan beres. Anehnya, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi beralasan, persentase yang sedikit itu disebabkan permintaan yang sedikit pula (*katadata.co.id*, 18,12,2020).



Tabel 1. Anggaran Kesehatan Tahun 2016-2021. Sumber: Informasi APBN Indonesia Tahun 2021 kemenkeu.go.id

Seharusnya respon kebijakan pandemi harus berbeda dari respon kebijakan biasanya sebelum terjadi resesi. Perbedaan itu terlihat pertumbuhannya untuk pengembangan dan penyelamatan, khususnya penyelamatan kesehatan. Bagaimana bisa keluar dari krisis pandemi jika fokus penyelamatan kesehatan diturunkan dengan penurunan anggaran kesehatan di APBN 2021 sebanyak 20,1 persen atau sebesar Rp. 212,5 triliun. Kebijakan ini banyak dipertanyakan para pengamat ekonomi, seperti Faisal Basri yang menganggap kesehatan masih ditempatkan di nomor dua yang sebenarnya dapat menggunakan anggaran infrastruktur karena lonjakan kenaikannya sangat tinggi (*katadata.co.id*, 16/01/2021). Kondisi ini tentu menuntut masyarakat lebih mandiri dalam pengeluaran kesehatan, kasihan masyarakat Indonesia jika sudah ditekan dengan perekonomian yang terpuruk namun harus mengalokasikan pengeluaran lebih banyak. Terlihat kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan untuk percepatan pemulihan kesehatan yang diikuti peningkatan akses dan mutu layanan sistem kesehatan.

Mempertahankan daya beli dan penghasilan hingga lapangan pekerjaan akan sangat sulit jika diselesaikan dalam kondisi ekonomi yang sedang melambat. Apalagi dipengaruhi oleh pelemahan ekonomi global yang juga melambat sehingga permintaan global atas produk dalam negeri semakin berkurang. Sembari menunggu pelemahan ekonomi global berakhir, ekonomi dalam negeri harus tetap dipertahankan karena tidak mungkin dibiarkan terjerumus ke dalam jurang depresi ekonomi.

Menurut Bachtiar, depresi ditandai dengan PDB yang menunjukkan angka negatif selama kurun waktu dua kuartal berturut-turut. Berarti produktifitas ekonomi benar-benar jatuh, kapasitas ekonomi berjalan di bawah potensi ekonomi yang ada. Ekonomi dapat dikatakan bangkrut dalam kondisi ini, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan demi memenuhi kebutuhan manusia yang tidak pernah akan lenyap. Ia memandang bahwa ekonomi yang jatuh seperti ini dapat dibangkitkan dari inovasi-inovasi yang muncul dari kemajuan teknologi atau kreatifitas dunia usaha yang berprestasi tinggi dan memiliki branding ternama (Bachtiar Hassan Miraza, 2019:13).

Selain kebijakan moneter, kebijakan fiskal yang dilakukan negara haruslah dilakukan demi mengatasi resesi yang terjadi di Indonesia. Peran pemerintah bukan hanya sebagai *customer service* yang muncul hanya ketika dibutuhkan. Pemerintah wajib menjaga adanya kestabilan antara penawaran dan permintaan, mencegah munculnya persaingan usaha tidak sehat, mencegah terjadinya monopoli perdagangan bagi usaha kecil dan infant, serta menyediakan fasilitas publik yang dapat mendorong jalannya roda perekonomian (Ina Heliany, 2021:18).

3. Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Islam memiliki sistem ekonomi yang khas dan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme. Menurut Chapra (1995) bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan dan aturan/syariat yang melahirkan cara pandang tertentu terhadap dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid syariah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang saat ini banyak negara menerapkannya. Islam menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi tidak boleh mendasari aktivitas hanya sekedar materi, namun konsep kebahagiaan manusia (*falah*) juga kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) sehingga menghasilkan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual manusia (Nurul Huda, 2015:120).

Pembangunan ekonomi yang melahirkan kebijakan adalah bagian dari kewenangan negara dalam pengelolaan kekayaan oleh negara (*at-tasharruf*). Baqir ash-Shadr mengembangkan terminologi ini dengan istilah intervensi *daulah* (*tadakhkhul ad-daulah*) yakni negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam kajian Islam lebih dikenal dengan istilah *siyasah maliyah*, atau Politik Ekonomi Islam (Ija Suntana, 2010:14).

Politik ekonomi adalah model pengaturan yang bertujuan untuk mencapai hasil dari suatu hukum yang diterapkan dalam mekanisme pengaturan urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam sebagai tujuan agar terjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) setiap individu secara keseluruhan, dengan memperhatikan kemungkinan agar terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder hingga tersiernya sesuai kadar kesanggupannya, sebagai individu yang hidup dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup (*life style*) tertentu.

Maka tujuan dari politik ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada meningkatkan taraf kehidupan suatu negara, namun terjamin tidaknya setiap orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan individu bukan berarti memberikan pintu penguasaan individu selebar-lebarnya, namun memastikan jaminan hak hidup setiap orang. Islam memperhatikan masyarakat memiliki gaya hidup tertentu, maka Islam pun memposisikan diri sebagai cara pandang yang dipergunakan masyarakat secara mendasar dalam memandang kehidupan dan kemakmuran.

Politik ekonomi Islam sebagai cabang ilmu yang dipilih untuk menangani persoalan resesi dan pembangunan ekonomi karena menyangkut dua hal, yakni mengadaptasi hukum yang tersedia dan mengisi kekosongan hukum dengan cara pembuatan hukum. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai hukum Islam dan aturan pembuatan hukum, maka dalam penentuan kebijakan pembangunan ekonomi Islam harus memenuhi beberapa landasan sebagai berikut (Ija Suntana, 2010:16):

Pertama, landasan tauhid (*tauhidullah*). Landasan ini melahirkan persepsi dasar bahwa seluruh kehidupan, baik sumber daya maupun di luar ekonomi adalah berasal dari Allah swt. yang diberikan kepada siapa yang sudah diatur-Nya, tidak hanya milik perseorangan melainkan milik publik dan harus dapat diakses oleh semua orang. Harta yang

kita miliki sekarang pun terdapat hak orang lain di dalamnya, harus dikeluarkan dengan cara yang baik dan sesuai prioritas yang sudah diatur.

Kedua, landasan keadilan (*'adalah*). Landasan ini mendasari bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus dialokasikan secara adil dan terjangkau oleh semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmatinya.

Ketiga, landasan keberlanjutan (*istimrariyah*). Prinsip pendayagunaan sumber-sumber ekonomi demi menjaga kelestarian fungsi sumbernya secara keberlanjutan. Sebagaimana sumber-sumber ekonomi yang terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan konsumsi manusia yang tidak terbatas, maka harus dilakukan efisiensi dalam pengelolaan dan distribusi sumber-sumber yang dibutuhkan.

Islam mengatur tanggungjawab dalam kesamaan derajat sosial, semua di mata Allah swt. adalah sama dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menjadikan pandangan khas masyarakat terhadap sesuatu yang tidak familiar dikenal dalam sistem ekonomi Indonesia saat ini. Seperti konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) yang dibagi ke dalam tiga jenis, yakni: Kepemilikan individu, Kepemilikan umum, dan Kepemilikan negara. Perbedaan kepemilikan ini menjadi salah satu pilar berdirinya ekonomi Islam, selain juga pengaturan tentang pemanfaatan kepemilikan (*at-tasharruf al-milkiyyah*) dan distribusi harta kekayaan di tengah masyarakat (*tauzi'u tsarwah baynannas*). Pilar-pilar ekonomi Islam tersebut menjadi landasan pengatuan kebijakan pembangunan ekonomi. Beberapa landasan pembangunan ekonomi di antaranya:

a. Menghidupkan dorongan manusia untuk mencari sumber-sumber ekonomi.

Ekonomi berjalan karena ditopang oleh perilaku individu-individu dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Seperti halnya konsep rezeki yang sudah diatur oleh Allah swt. namun Islam menegaskan bahwa muslim bertakwa adalah yang berikhtiar mencari rezeki, sebab tawakkal tidak dimaksudkan hanya untuk pasrah. Setiap laki-laki wajib mencari nafkah untuk keluarganya, setiap orang wajib mencari rezeki yang halal, dan cara yang digunakan dapat dikembangkan selama tidak melanggar dari rambu-rambu larangan syariah.

Tugas paling menantang dari kebijakan politik ekonomi berbasis syariah adalah memotivasi manusia untuk melakukan segala sesuatu yang perlu demi kepentingan alokasi yang efisiensi dan distribusi yang adil dari sumber daya (Ija Suntana, 2010:18). Sumber-sumber ekonomi mendasar yang menjadi prioritas manusia bersumber pada empat sektor: pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Islam berpendapat bahwa manusia diberikan kelelahan kepemilikan dan berproduksi, sebagaimana firman-Nya: "*Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.*" (TQS. Al-Mulk [67]: 15)

Perlu diperhatikan bahwa kelelahan (*kemubahan*) kepemilikan dan berproduksi tidak sama dengan kebebasan kepemilikan dan berproduksi. Kebebasan kepemilikan dan berproduksi mendatangkan kedzaliman dan membolehkan manusia melakukan cara apapun demi memiliki harta. Kebebasan ini dibiarkan oleh sistem ekonomi kapitalisme sebab sistem ekonomi tersebut menjadikan pertumbuhan pendapatan nasional sebagai asas penentuan pertumbuhan ekonomi (Abdurrahman Al-Maliki, 2001:41-42). Semakin tinggi tingkat produksi maka sebuah negara dinilai makin bertumbuh, tidak peduli terbebas dari unsur haram atau tidak.

b. Distribusi demi menghindari kekayaan yang terpusat.

Kekayaan yang hanya beredar di antara pusat-pusat tertentu, atau bahkan orang-orang tertentu, harus didistribusikan agar terciptanya pemerataan ekonomi. Sebagaimana firman-Nya: "*Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang*

berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (TQS. Al-Hasyr [59]: 7)

Ija Suntana menjelaskan bahwa pengurangan pemusatan kekayaan dapat dilakukan dengan dua kebijakan, yakni *Land Reform* dan Pengembangan Perusahaan Kecil dan Mikro. Kebijakan *land reform* dilakukan untuk mengatasi masalah ukuran pemilikan tanah dan masa sewa. Dalam terminologi fiqh dikenal dengan *ihya al-mawat*, menghidupkan tanah mati, dengan merehabilitasi lahan-lahan kritis untuk dijadikan model *land reform*. Sedangkan pengembangan perusahaan kecil dan mikro dapat dilakukan dengan cara penyuntikan dana dan pembuatan aturan khusus bagi mereka (Ija Suntana, 2010:20).

c. Restrukturisasi ekonomi publik.

Al Quran melarang perbuatan *tabdzir*, boros. Baik boros pada konsumsi maupun produksi, keduanya dilarang. Boros pada konsumsi sebagaimana seseorang melakukan aktivitas konsumsi berlebihan dari kebutuhan hanya untuk memenuhi nafsunya. Sedangkan boros pada produksi dapat dimaknai seseorang yang melakukan eksploitasi kekayaan tanpa mempertimbangkan sisi maslahatnya. Perilaku boros ini perlu dipahami kepada masyarakat baik jenisnya maupun dampaknya.

Selain pemborosan, kebijakan ekonomi publik juga harus memperhatikan prioritas dalam pengeluaran. Setiap pengeluaran negara harus mengutamakan kesejahteraan publik, sesuai porsi yang dibutuhkan terlebih dahulu oleh masyarakat sehingga dapat terdistribusi secara adil untuk kemaslahatan umat. Kas negara paling utama harus diserahkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok individu, masyarakat, dan negara. Kebutuhan pokok individu yang dimaksud berupa: sandang, pangan, dan papan. Adapun kebutuhan pokok masyarakat yang dimaksud adalah: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan alokasi kebutuhan pokok negara dapat diarahkan kepada penyelenggaraan negara, membangun infrastruktur, membangun industri berat, industri strategis, dsb (Dwi Contro Triono: 2014:394).

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan rambu-rambu sebagai kaidah dalam prioritas kebijakan pengeluaran kas negara, yakni (Ija Suntana, 2010:22):

- 1) Pengeluaran harus diprioritaskan utama untuk kesejahteraan umum.
- 2) Menanggulangi kesulitan dan penderitaan harus diutamakan daripada pengeluaran pembangunan yang tidak penting. Seperti pengeluaran untuk menanggulangi pandemi atau bencana alam lainnya harus diutamakan daripada membiayai aktivitas seni.
- 3) Pengeluaran untuk kepentingan umum harus diutamakan daripada untuk kelompok terbatas.
- 4) Setiap penerima manfaat harus menanggung biaya.

d. Restrukturisasi keuangan

Restrukturisasi keuangan ini ditujukan untuk pembangunan masyarakat pinggiran (*badiyah*) dan pengoperasian sistem keuangan berbasis tanggung resiko bersama. Islam mengatur pembatasan alokasi pendapatan negara, artinya terdapat pendapatan yang hanya boleh dialokasikan untuk kelompok tertentu. Seperti zakat dan *fidyah* hanya dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil, tidak untuk membantu pengembangan orang-orang kaya.

Penyusunan keuangan dimulai dari sumber utama pendapatan hingga alokasi pembelanjannya harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini yang menjadi pembeda utama dari APBN yang dirancang dalam sistem ekonomi konvensional, sebab harus merujuk kepada prinsip anggaran berimbang. Artinya belanja pemerintah harus seimbang dengan penerimaannya, jika terjadi kekurangan maka inilah yang disebut sebagai defisit fiskal. Kalau sudah defisit maka biasanya akan salah satu cara untuk menutupnya, seperti: (1) Penjualan obligasi; (2) Pinjaman dari bank sentral (cetak uang baru); (3) Pinjaman di pasar modal baik dalam maupun luar negeri; atau (4) Pinjaman resmi dari pemerintah negara-negara donor. Tidak heran jika Indonesia yang menganut sistem APBN seperti ini banyak mengandalkan pada utang yang semakin menumpuk (Dwi Contro Triono, 2014:404).

Islam mengenal tiga sektor utama sebagai kas negara yang harus dikelola, yakni sektor kepemilikan individu, sektor kepemilikan umum, dan sektor kepemilikan negara. Kas dari sektor kepemilikan individu diperoleh dari shodaqoh, hibah, zakat, dsb. Namun khusus untuk zakat tidak boleh dicampur dengan harta lainnya. Lalu dari sektor kepemilikan umum dapat diperoleh dari pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan, dsb. Sedangkan sektor kepemilikan negara dapat diperoleh dari *jizyah*, *kharaj*, *ghanimah*, *fa'i*, *'usyur*, dsb.

e. Perubahan struktural

Perubahan struktural dapat dilakukan dengan bentuk reformasi institusi dan perubahan kebijakan yang proporsional. Reformasi institusi diarahkan untuk perubahan strategis tentang institusi mana yang harus didirikan, mana yang harus dirampingkan, mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Pertimbangan ini berdasarkan skala prioritas (*al-aulawiyat*) dan rasionalitas faktual sebagaimana pengeluaran anggaran. Sedangkan kebijakan yang diubah boleh dilakukan dengan dasar kemaslahatan, jangan sampai terjerumus pada pemborosan struktural (Ija Suntana, 2010:24).

4. Kesejahteraan dalam Standar Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi bagi para ahli ekonomi konvensional lebih menekankan pada aktivitas produksi, namun Islam berbeda dalam memandang standar pertumbuhan ekonomi. Lebih dari sekedar aktivitas produksi, pertumbuhan ekonomi pula berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Sebab pertumbuhan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan perkembangan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia (Abdullah, 2004).

Seandainya terdapat sebidang tanah yang harus dimanfaatkan, maka ekonomi tidak hanya mengurus pemungutan pajak dari status tanah atau pajak dari hasil tanah tersebut. Islam memandang perlu adanya “pemakmuran bumi” yang pengertiannya lebih luas daripada terminologi pertumbuhan ekonomi sistem kapitalisme atau sosialisme di barat. Pemakmuran bumi yang pahami dari firman Allah Swt. Surat Hud [11] ayat 61:

“...Dia yang menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya...”

Maksud “pemakmuran tanah” mengandung terminologi tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada gubernurnya di Mesir, *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur.”*

Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* (784 H) pernah menyinggung tentang pertumbuhan ekonomi di Bab Peradaban dan Cara Mewujudkannya. Ada pula Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* mengungkap terminologi harga dalam pembahasan tentang

pertumbuhan ekonomi, salah satu saran yang ia usulkan bagi Khalifah Harun al-Rasyid agar pemimpin negara mampu mengatur kebijakan tentang pajak.

Terminologi lain yang berhubungan dengan resesi ekonomi dan dikritisi dalam Islam adalah seputar kelangkaan, di mana terminologi ini tidak membedakan antara kebutuhan (*need*) dan keinginan (*wants*). Manusia memiliki kebutuhan (*need*) yang terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas (*wants*), sehingga keinginan manusia pun dilihat sebagai sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi seluruhnya dengan cara memfokuskan pada sektor produksi. Ditambah anggapan salah lainnya bahwa kebutuhan manusia hanya berupa materi, padahal manusia pun mempunyai non-materi yang harus dipenuhi, seperti ruhiyah (agama), kasih sayang, kebutuhan moral, keturunan, dsb.

Islam memandang bahwa problem kelangkaan adalah problem sampingan, problem cabang, atau problem sekunder (Dwi Condro, 2014:232). Masalah produksi merupakan masalah yang masih bisa terukur, karena kemampuan ketersediaan barang dapat ditekan sesuai dengan kebutuhan. Realita menunjukkan sekalipun sumber tersedia bahkan melimpah ruah, namun keadaan tidak dapat memenuhi kebutuhan karena terdapat masalah dalam sektor distribusi. Di sini Islam melihat problem utama ekonomi terdapat dalam konsep distribusi yang tidak adil. Islam mengatur bagaimana hukum produksi hingga konsumsi suatu barang, namun yang menjadi fokus adalah dalam proses distribusi kekayaan (*tauzi' u tsarwah baynan-naas*), selain konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*) dan pemanfaatan kepemilikan (*at-tasharruf fil-milkiyyah*).

Ketiga konsep yang difokuskan menjadi inti persoalan ekonomi tidak dipandang sebagai masalah mendasar, sebab sistem ekonomi Indonesia memandang masalah mendasar ada pada kelangkaan (*scarcity*) sumber-sumber ekonomi. Berangkat dari sudut pandang materialisme bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, maka dibuatkanlah suatu parameter peningkatan produksi agar mengurangi kelangkaan sumber daya ekonomi. Tetap dengan berpandangan seperti ini mereka berusaha merumuskan ekonomi yang dapat menghadapi jika terjadinya kelangkaan, sebab jika sewaktu-waktu terjadi kejadian alam yang menyebabkan kelangkaan maka teori ekonomi mereka yang mengatur agar terciptanya efisiensi ekonomi dan keseimbangan pasar (*market equilibrium*).

Dalam kenyataannya kelangkaan yang menjadi problem utama sistem ekonomi seperti ini tidak hanya disebabkan oleh kejadian alam, misalnya terjadi saat resesi Indonesia tahun 2020 di mana sedang dilanda pandemi. Kejadian itu memang menjadi sebab kelangkaan timbul, namun jika melihat beberapa tahun ke belakang ketika krisis Indonesia melanda di pertengahan tahun 1960-an atau akhir tahun 1990-an krisis terjadi disebabkan oleh faktor manusia. Dari sini pandangan peran masyarakat terhadap perkembangan ekonomi menjadi saling berkaitan. *Pertama*, suatu masyarakat harus mengadakan satu sistem bagaimana memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, masyarakat yang mengatur bagaimana hasil produksi dibagi sedemikian rupa sehingga lebih banyak yang dihasilkan.

Islam tidak memandang kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi, namun tetap harus diselesaikan jika permasalahan itu muncul. Artinya baik PDB maupun PNB bukanlah standar penentuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, pemenuhan kebutuhan primer individu menjadi prioritas utama persoalan ekonomi dalam Islam. selain standar materialistis, Islam pun mempunyai standar *ruhiyah* atau spiritual dalam memenuhi keberlangsungan ekonomi. sebagaimana pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab ketika datang Tahun Ramadah, masa di mana manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik. Sebabnya pun hampir sama dengan resesi Indonesia kemarin, yakni karena kejadian alam

sulitnya air dan terhentinya hujan menyebabkan aktivitas pertanian sebagai penopang aktivitas ekonomi saat itu sempat terhenti. Beliau menanggulangi masa krisis dengan cara material dan cara spiritual.

Pertama, cara material yang dilakukan Khalifah Umar bin al-Khattab adalah dengan mengarahkan berbagai sumber untuk penanggulangan krisis. Salah satu sikap beliau adalah menetapkan prioritas infak dengan bentuk langsung. Sa'ib bin Yazid berkata, "Umar bin al-Khattab mengendarai unta, lalu unta mengeluarkan kotoran berupa *syair* (jenis gandum) dan Umar melihatnya, maka Umar berkata, "Kaum muslimin mati kelaparan, dan unta ini makan syair? Tidak, demi Allah aku tidak akan mengendarainya hingga manusia hidup (tidak kelaparan)." (Jaribah, 2006:374).

Selain itu Khalifah Umar pernah mengambil kebijakan politik jangka panjang untuk menanggulangi krisis. Salah satunya adalah penggalan teluk yang menghubungkan Madinah dan Mesir agar bantuan dari Mesir sampai ke Madinah dengan cepat dan mudah; di mana beliau berkata kepada 'Amr bin 'Ash *Radhiyallahu 'Anhu*, "Sesungguhnya Allah membukakan Mesir kepada kaum muslimin, dan dia memiliki banyak harta dan makanan. Sungguh telah sampai di benakku -karena kecintaanku kepada penduduk dua tanah suci (Makkah dan Madinah) dan memberikan keluasan ekonomi mereka ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka dalam menaklukkan Mesir dan menjadikannya kuat bagi mereka dan bagi kaum muslimin, jika aku menggali untuk mereka teluk dari sungai Nil hingga laut Merah. Sebab itu akan lebih memudahkan apa yang kami inginkan tentang membawa makanan ke Madinah dan Makkah; karena membawanya dengan unta melalui darat sangat jauh jaraknya dan tidak menyampaikan apa yang kami inginkan; maka pergilah kamu dan teman-temanmu, lalu bermusyawarahlah kamu dalam hal tersebut sehingga sepakat pendapat kalian." (Jaribah, 2006:377).

Kedua, Khalifah Umar menghadapi krisis dengan melakukan cara maknawi atau spiritual. Seorang muslim melihat kestabilan kondisi ekonomi dan sosial adalah berarti komitmen kepada ajaran-ajaran Islam dan melaksanakannya, dan tidak jatuh kepada larangan-Nya. Beliau memerintahkan kepada seluruh kaum muslim untuk wajib ketika datang bencana seperti Tahun Ramadah waktu itu dengan segera bertaubat, memohon istighfar (ampunan), mendekatkan diri dengan amal sholeh, menguatkan do'a untuk mengangkat apa yang telah menimpa kaum muslimin (Jaribah, 2006:379-381).

Selain standar penentuan kesejahteraan ekonomi, terdapat terminologi lain yang dikritisi oleh Islam berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, yakni pandangannya terhadap nilai suatu barang. Prinsip yang mudah dipahami dari *value theory* adalah dua jenis nilai pada barang, yakni nilai guna (*value in use*) dan nilai tukar (*value in exchange*). Teori ini dipopulerkan oleh Adam Smith, yang menurutnya nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Sedangkan untuk mengukur tenaga buruh yang dicurahkan, tidak hanya diukur dari jam kerjanya saja, tetapi juga harus dilihat dari tingkat keterampilan butuh yang mengerjakannya.

Teori ini membawa kepada sistem bunga, yakni tambahan pengembalian dari pinjaman. Mereka menganggap uang merupakan bagian dari value jika dipinjamkan selama jangka waktu tertentu. Teori ini dinamakan *time value of money*, bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar angka dari uang yang sama di waktu mendatang. Seandainya uang itu tidak dimanfaatkan namun dipinjamkan, maka uang yang seharusnya menghasilkan dipaksa harus menghasilkan dengan sistem bunga. Tambahan pengembalian dari pinjaman itu dianalogikan nilai yang dapat dihasilkan selama dipinjamkan, artinya uang dijadikan sebagai objek komoditas yang dapat menghasilkan. Masalahnya setiap resesi Indonesia tidak lepas dari penanganan moneter yang dilakukan pemerintah dengan cara pengendalian jumlah

uang yang beredar dan penetapan tingkat suku bunga, maka jelas akan sangat berpengaruh kajian hukum bunga bagi kebijakan politik ekonomi.

Berbeda dengan Islam yang sejak awal menolak sistem bunga karena hukumnya adalah haram. Bunga adalah termasuk bagian dari riba yang diharamkan secara mutlak (sebagaimana Surat Al-Baqoroh [2]: 275). Setiap transaksi yang mengandung unsur riba harus dihilangkan, termasuk transaksi yang melibatkan negara. Dalam perspektif Islam, setiap kebijakan moneter harus sesuai syariah dan tidak mengandung unsur haram seperti riba. Pinjaman yang dilakukan oleh negara pun sebaiknya tidak disertai dengan bunga, karena selain dilarang juga memberatkan pihak yang meminjam karena dalam kondisi yang membutuhkan. Tahun 2021 Indonesia menetapkan pembayaran bunga utang dalam APBN sebesar Rp. 373,3 triliun, angka yang bertambah dari APBN 2020 sebesar Rp. 338,8 triliun. Porsi yang besar itu akhirnya mengharuskan pemerintah berencana mencari utang baru sebesar Rp. 1.142 triliun untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp. 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB. Banyak pengamat menilai rencana penambahan tidak sepenuhnya untuk program pemulihan ekonomi, namun lebih terkesan terjebak dalam sistem gali lubang tutup lubang (*republika.co.id*, 27/12/2020).

Masalah bunga dan utang pun harus sangat diwaspadai sebab dapat menimbulkan dampak resesi terhadap suatu negara. Utang yang semakin bertambah signifikan dapat mempengaruhi pasar uang dan pasar modal, kita harus belajar bagaimana saat dinaikannya suku bunga yang menjadi pertanda terjadinya krisis tahun 1998 yang lalu. Akhirnya kesulitan bank-bank semakin sulit terukur, perbankan mengalami *negative spread* sehingga fungsinya sebagai pemasok dana ke sektor riil semakin terhambat. Tidak heran jika Islam mengharamkan bunga dan dalam kebijakan anggaran negaranya tidak terlalu mengandalkan utang sebagai solusinya.

D. Kesimpulan

Krisis hingga resesi di Indonesia pernah terjadi karena perbuatan manusia dan sebab kemunculan kejadian alam. Resesi yang dirasakan Indonesia diukur berdasarkan standar pengukuran ekonomi konvensional berupa standar pertumbuhan ekonomi yang menurun. Kebijakan yang dikeluarkan harus memenuhi standar dari sistem ekonomi yang diterapkan, mulai dari penyusunan anggaran hingga reformasi struktural. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengharuskan negara wajib memelihara kesejahteraan masyarakat, karena Islam memandang pemenuhan kebutuhan individu adalah faktor utama dalam kebijakan perekonomian. Islam banyak mengkritisi sistem ekonomi Indonesia, mulai dari struktur kebijakan hingga standar filosofi pengelolaan ekonomi. Maka, Islam melihat kebijakan penanganan resesi ekonomi di Indonesia masih banyak yang harus dibenahi demi terciptanya kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Terj. Asmuni Solihan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Al-Maliki, Abdurrahman (2001). *Politik Ekonomi Islam*, Jatim: al-Izzah
- Blandina, Selena Riri., Fitriani, Alvin Noor., Septiyani, Wulan., (2020), *Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi*, Jurnal Efektor, Vol. 7 Issue 2
- Feith, Herbert (1967). "Politics of Economics Decline" dalam *Soekarno's Guided Economy*, T.k. Tan (ed.), Brisbane & Melbourne: The Jacaranda Press

- Fitrah, Muh, dan Luthfiah (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Sukabumi: Jejak Publisher
- Hasyim, Ali Ibrahim (2016). *Ekonomi Makro*, Jakarta: Kencana
- Helianny, Ina (2021), *Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia*, Prosiding Seminar Stiarni, Vol. 8 No. 1
- Huda, Nurul, 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Kencana
- Jawangga, Yan Hanif (2019). *Seri Pengayaan Pembelajaran Ekonomi: Ilmu Ekonomi Makro*, Surakarta: Aksara Sinergi Media
- Legge, John (1972) *Soekarno: A Political Biography*, Melbourne: Penguin Books
- Manning, Chris (2000). *Labour Market Adjustment to Indonesia's Economic Crisis: Context, Trends and Implications*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36 (1)
- Miraza, Bachtiar Hassan (2019). *Seputar Resesi dan Depresi*, *Jurnal Ekonomi KIAT*, Vol. 3 No. 2
- Ray, David (2003). *Survey of Recent Developments*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39 (3)
- Rukin (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia
- Suntana, Ija (2010). *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Triono, Dwi Condro (2014). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz
- Wie, Thee Kian (2016). *Dari Krisis Ke Krisis: Masyarakat Indonesia Menghadapi Resesi Ekonomi Selama Abad Ke-20*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press